

## DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Oleh:

**Nur Kholis Majid<sup>1</sup>**

UIN Raden Mas Said Surakarta

Alamat: JL. Pandawa, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,  
Provinsi Jawa Tengah (57168).

Korespondensi Penulis: [nurkholismajid@staff.uinsaid.ac.id](mailto:nurkholismajid@staff.uinsaid.ac.id)

**Abstract.** *The emergence of identity politics in Indonesia is an inevitability, considering that the Indonesian nation has a diversity of ethnicities, religions, and cultures. However, identity politics needs to be managed well because it can lead to political polarization that has the potential to divide unity. This research aims to examine the development of identity politics, identify the factors influencing the development of identity politics, and understand how to implement Pancasila to manage identity politics in Indonesia. This research is qualitative with a descriptive approach. The result of this research is that the development of identity politics in Indonesia has experienced ups and downs from the colonial period (pre-independence) to the post-reform era. Identity politics emerges based on regionalism, ideology, ethnicity, religion, race, and intergroup relations. The factors influencing the development of identity politics in Indonesia include (1) the diversity of ethnicities, religions, and cultures, (2) regional autonomy policies, and (3) advancements in information and communication technology. One way to implement Pancasila in managing identity politics is by applying the values of Pancasila in daily life and enforcing the law against identity politics practices that violate the law.*

**Keywords:** *Dynamics, Identity Politics, Pancasila Perspective.*

**Abstrak.** Munculnya politik identitas di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan, mengingat bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Namun politik identitas ini perlu dikelola dengan baik karena politik identitas dapat berdampak

---

Received February 15, 2025; Revised February 28, 2025; March 06, 2025

\*Corresponding author: [nurkholismajid@staff.uinsaid.ac.id](mailto:nurkholismajid@staff.uinsaid.ac.id)

## **DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA**

pada polarisasi politik yang berpotensi memecah belah persatuan. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan politik identitas, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan politik identitas, dan mengetahui cara mengimplementasikan Pancasila untuk mengelola politik identitas di Indonesia. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah perkembangan politik identitas di Indonesia sejak masa penjajahan (pra kemerdekaan) hingga masa pasca reformasi mengalami pasang surut. Politik identitas muncul berbasiskan kedaerahan, ideologi, suku, agama, ras, dan antar golongan. Politik identitas di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain (1) keanekaragaman suku, agama, dan budaya, (2) kebijakan otonomi daerah, dan (3) kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Cara mengimplementasikan Pancasila untuk mengelola politik identitas adalah dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan penegakan hukum terhadap praktek politik identitas yang melanggar hukum.

**Kata Kunci:** Dinamika, Politik Identitas, Perspektif Pancasila.

### **LATAR BELAKANG**

Perkembangan politik identitas di Indonesia mulai membuat khawatir masyarakat karena berdampak pada polarisasi politik di masyarakat yang berpotensi memecah belah persatuan. Penggunaan media sosial untuk kampanye politik seringkali membawa resiko penyebaran ujaran kebencian dan informasi hoaks yang berbasis identitas. Resiko tersebut pada akhirnya tidak hanya menimbulkan ketegangan sosial namun juga polarisasi politik di masyarakat. Konflik sosial yang muncul akibat dari polarisasi politik di masyarakat tak jarang menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan yang disebabkan oleh preferensi politik yang berbeda.

Kajian tentang politik identitas ini pernah dilakukan oleh Rendy Adiwilaga dan kawan-kawan dengan judul penelitian “Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis”. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab yang lebih mendasar munculnya politik identitas di Indonesia. Penelitian ini berkesimpulan bahwa politik identitas bukan didasari pada ketertindasan atau marginalisasi masyarakat etnis sehingga berkompetisi merebut kekuasaan melalui mekanisme pemilu, tetapi lebih didasari pada kesadaran untuk menyumbang ide dan pemikiran pentingnya nilai-nilai lokal sebagai jawaban dan solusi atas permasalahan bangsa (Adiwilaga et al., 2017).

Juhana Nasrudin juga melakukan kajian mengenai politik identitas dengan judul penelitian “Politik Identitas dan Representasi Politik (studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh orientasi politik identitas dan representasi politik terhadap Pilkada DKI periode 2018-2022. Penelitian ini berkesimpulan bahwa orientasi politik identitas dan representasi politik berpengaruh terhadap Pilkada DKI periode 2018-2022 terutama pada putaran kedua. Adapun bentuk orientasinya adalah ekonomi, agama dan ras (Nasrudin, 2018).

Kajian mengenai politik identitas juga dilakukan oleh Yeni Sri Lestari dengan judul penelitian “Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama”. Penelitian ini fokus pada dua kelompok identitas yaitu kelompok agama dan kelompok nasionalis. Penelitian ini berkesimpulan bahwa polarisasi politik di masyarakat disebabkan oleh perseteruan antara kelompok yang berbasis identitas keagamaan dan identitas nasionalis. Hal ini mengakibatkan munculnya ujaran kebencian, berita hoax, persekusi, dan lain-lain, yang berdampak pada terganggunya stabilitas negara (Lestari, 2018).

Pada tahun 2021, Frenki juga melakukan kajian tentang politik identitas dengan judul penelitian “Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politisasi identitas dalam persaingan pemilu di Indonesia. Dalam penelitian ini diperoleh temuan bahwa para kandidat yang berpeluang besar memenangkan kontestan politik dalam pemilu adalah kandidat yang memiliki modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi (Frenki, 2021).

Dari penelitian terdahulu tersebut di atas, penulis memandang bahwa mengkaji mengenai “Dinamika Politik Identitas di Indonesia dalam Perspektif Pancasila” menjadi sangat relevan sebagai upaya untuk berkontribusi dalam mengelola politik identitas guna menjaga persatuan dan kesatuan, serta stabilitas negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji praktek politik identitas di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah mengkaji perkembangan politik identitas sejak masa penjajahan hingga masa pasca reformasi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan politik identitas, dan bagaimana implementasi Pancasila untuk mengelola politik identitas.

# DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

## KAJIAN TEORITIS

Politik berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani yang artinya kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik artinya pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik” memberikan definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Surbakti, 1992).

Menurut Rod Hague et al., politik adalah upaya kolektif untuk menyelesaikan konflik di antara mereka sendiri dengan mengambil keputusan yang mengikat secara kolektif. Sedangkan menurut Andrew Heywood, politik adalah upaya kerjasama dalam membuat, mempertahankan, dan merubah peraturan, yang tidak terlepas dari konflik (Budiardjo, 2017). Dari kedua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa politik adalah suatu usaha bersama dari sekelompok orang atau masyarakat untuk menyelesaikan konflik, membuat keputusan yang mengikat, dan mengatur kehidupan masyarakat.

Miriam Budiardjo dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik” memberikan uraian tentang lima unsur pokok dalam konsep politik (Budiardjo, 2017):

1. Negara (*state*)

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan ditaati rakyatnya. Definisi politik ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya.

2. Kekuasaan (*power*)

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku orang atau kelompok lain. Politik merupakan kegiatan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

3. Pengambilan keputusan (*decision making*)

Keputusan (*decision*) adalah hasil pilihan yang ditetapkan dari beberapa alternatif pilihan. Sedangkan pengambilan keputusan (*decision making*) adalah proses dalam memilih beberapa alternatif keputusan hingga diperoleh hasil keputusan. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat.

#### 4. Kebijakan (*policy, beleid*)

Kebijakan (*policy*) adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok sebagai upaya memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pihak yang mengambil keputusan itu adalah pihak yang memiliki kekuasaan.

#### 5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)

Yang dimaksud pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) ini adalah pembagian atau penjatahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Definisi ini bermula dari anggapan bahwa pembagian nilai-nilai yang tidak merata dapat menimbulkan konflik dan hal ini berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.

Identitas berasal dari kata *identity* (bahasa Inggris) yang artinya ciri-ciri atau jati diri seseorang atau kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, atau jati diri. Istilah identitas dapat diartikan sebagai ciri-ciri seseorang atau kelompok sebagai pembeda dengan orang lain atau kelompok lain. Identitas terbagi dalam dua jenis yaitu identitas pribadi dan identitas kelompok. Identitas individu adalah konsep yang dikembangkan seseorang tentang dirinya. Identitas kelompok adalah rasa kesamaan yang dimiliki suatu kelompok (Sulaeman, 2022).

Setiap orang memiliki identitas unik yang membedakan mereka satu sama lain. Bahkan setiap individu dalam suatu kelompok yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama, juga memiliki identitas berbeda. Suatu identitas ada kalanya bersifat egois untuk memaksakan kehendaknya demi kepentingan politiknya, sehingga menimbulkan pembelahan antar individu atau kelompok yang berbeda kepentingan politiknya.

Agnes Heller berpandangan bahwa politik identitas adalah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai kategori utama. Menurutnya politik identitas bisa menimbulkan toleransi dan kebebasan, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan intoleransi, kekerasan, dan konflik antar etnis. Politik identitas menjadi alat untuk menggalang dukungan guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya (Adiwilaga et al., 2017).

Munculnya politik identitas bermula dari gerakan mahasiswa anti-kekerasan yang tergabung dalam organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada awal tahun

## **DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA**

1960-an yang dikenal dengan nama SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Committee). Pada intinya, politik identitas berkaitan dengan keprihatinan individu dalam sebuah komunitas yang mengalami marjinalisasi dan penindasan. Dari sinilah munculnya gagasan tentang keadilan untuk semua orang. Para ahli teori politik identitas berpandangan bahwa praktik pemerasan telah membangun kesadaran korban dan golongannya, khususnya golongan kulit hitam, masyarakat yang berbahasa Spanyol, dan etnis lainnya yang termarginalkan oleh kapitalisme yakni golongan kulit putih (Maarif, 2012).

Politik identitas juga dapat diartikan sebagai tindakan politik yang didasarkan pada perbedaan karakteristik suatu kelompok dengan kelompok lain. Hal ini berbeda dengan identitas politik yang cenderung pada identitas yang dimiliki seseorang atau kelompok yang berbeda dengan yang lain (Andriyani, 2011). Politik identitas merupakan cara memobilisasi massa dengan menggunakan identitas sebagai magnet untuk menarik setiap individu yang punya kesamaan dari agama, suku, dan budaya lainnya ke dalam kelompoknya demi berproses dalam menyelesaikan kepentingannya. Kelompok masyarakat tersebut akan merasa dirinya paling baik dibanding kelompok lain (Rahman, 2020). Dari beberapa definisi tersebut di atas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa politik identitas adalah suatu tindakan politik yang berbasis pada identitas yang bisa berupa suku, agama, ras, atau antargolongan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan bersifat kualitatif. *Library research* digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Sumber data penelitian diambil dari data primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lain yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian dan data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lain yang mendukung sumber data primer. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain mengumpulkan data, mereduksi data untuk menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian, menyajikan data, dan merumuskan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Politik Identitas di Indonesia**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak suku, budaya, dan agama. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan berkembangnya politik identitas dan tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Setiap individu dalam masyarakat membawa identitas masing-masing dan atas dasar kesamaan identitas tersebut akan membentuk budaya dalam masyarakat.

Konflik politik seringkali disebabkan oleh politik identitas, yang didasarkan pada identitas bersama. Hal ini terutama berlaku ketika ketegangan muncul antara kelompok yang lebih unggul satu sama lain atau antara mayoritas dan minoritas. Agama dipandang sebagai substansi yang keberadaannya mengancam keberagaman Indonesia, terutama bagi agama minoritas, menurut perspektif demokrasi liberal yang mengutamakan Pancasila di atas semua agama lain. Hal ini berlaku tanpa kecuali di Indonesia. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan pertikaian politik (Lestari, 2018).

Berkaitan dengan perkembangan politik identitas di Indonesia, La Ode Machdani Afala dalam bukunya yang berjudul “Politik Identitas di Indonesia” menyebut dengan istilah “Geneologi Identitas dalam Epos Politik” terbagi dalam empat periode perkembangan yaitu Pra Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi (Afala, 2020). Kehadiran penjajah pada masa Pra Kemerdekaan memicu munculnya berbagai kelompok identitas berbasis lokalitas atau kedaerahan. Identitas lokalitas ini sebagai simbol perekat identitas yang sama, dan membangun solidaritas serta kerjasama dengan kelompok identitas yang lain untuk melawan penjajahan.

Pada masa Orde Lama, politik aliran terlihat marak dan menimbulkan instabilitas sosial politik. Menurut Toni D. Pariela dalam buku Syafii Maarif yang berjudul “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita” mengemukakan bahwa pada masa Orde Lama, pluralisme primordial tidak berkembang dengan baik karena adanya kekuatan-kekuatan politik yang berbasis sentimen SARA (Maarif, 2012). Kenyataan ini semakin diperburuk dengan adanya pertarungan ideologis di antara kekuatan-kekuatan nasionalisme, agama, dan komunisme. Praktek “politik sebagai panglima” pada masa Orde Lama telah mengabaikan dimensi sosiologis dan terjebak dalam pertarungan politik kekuasaan.

## **DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA**

Instabilitas sosial politik yang terjadi pada masa Orde Lama menjadi penyebab traumatik bagi pemerintahan Orde Baru. Peran hegemonik pemerintah Orde Baru menimbulkan ketergantungan dan tersubordinasinya *civil society* kepada negara, sehingga mengabaikan pluralitas masyarakat (Maarif, 2012). Pemerintah Orde Baru menggunakan pendekatan keamanan sebagai alat untuk menekan potensi konflik akibat perbedaan untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Penggunaan pendekatan keamanan ini mengakibatkan tidak terciptanya ruang bagi perkembangan pluralisme di masyarakat.

Pada masa Reformasi, aspirasi politik tersalurkan secara terbuka namun tidak didukung dengan kematangan masyarakat dalam menyikapi perbedaan aspirasi yang muncul di masyarakat. Hal ini sebabkan kultur masyarakat yang berada dalam kondisi hegemoni negara yang sangat kuat pada masa Orde Baru. Dengan semangat demokrasi, pemerintah pada saat itu mengeluarkan kebijakan otonomi daerah dengan tujuan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta pemerataan pembangunan. Namun kebijakan ini membawa dampak terhadap munculnya kembali politik identitas berbasis kedaerahan, etnis, agama, dan ras. Hal ini terlihat dalam setiap kontestasi politik baik Pemilu maupun Pilkada.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Politik Identitas**

Dalam suatu negara demokrasi, munculnya politik identitas merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini sebagai konsekuensi diterapkannya sistem demokrasi dalam suatu negara dimana kebebasan berkumpul, berserikat dan berekspresi dijamin oleh negara (Adiwilaga et al., 2017). Dalam kehidupan politik setiap individu memiliki preferensi politik sebagai identitasnya dalam berpolitik. Dengan demikian politik identitas menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan politik di Indonesia yang menerapkan demokrasi.

Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi politik identitas berkembang di Indonesia:

1. Heterogenitas suku, agama, dan budaya

Primordialisme masih menjadi bayang-bayang dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pandangan masyarakat terhadap latar belakang identitas seorang calon kepala daerah masih menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pilihan dalam Pilkada. Hal ini menjadi efek psikologis bagi masyarakat sehingga

ada rasa tergantung terhadap calon yang memiliki kesamaan identitas dengan mereka (Sulaeman, 2022). Praktik politik identitas terlihat dalam kontestasi Pilpres 2019, dimana kompetisi antar kandidat banyak memainkan isu sentimen suku, agama, dan ras. Keanekaragaman suku, agama, dan budaya ini dikarenakan kondisi geografis negara Indonesia yang berupa kepulauan. Keadaan ini sangat memungkinkan bagi para politikus untuk memainkan sentimen etnis dan agama untuk memperoleh popularitas terutama dalam kontestasi politik.

## 2. Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan ternyata membawa dampak negatif terhadap pluralitas masyarakat. Menurut Budiman Sudjatmiko dalam buku “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita” mengemukakan bahwa otonomi daerah berdampak pada munculnya Peraturan Daerah bertendensi Syariah pada masa Orde Baru (Maarif, 2012). Otonomi daerah juga memicu munculnya politik identitas yang berbasis kedaerahan, etnis dan agama, seperti isu-isu mengenai putra daerah, etnisitas birokrasi, dan politisasi agama di daerah.

## 3. Teknologi informasi dan komunikasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, menyebabkan banyak masyarakat menggunakan media sosial sebagai media perantara untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi. Media sosial telah menjadi sumber alternatif pemenuhan kebutuhan informasi sehingga semakin banyak orang menggunakan media sosial. Kondisi ini oleh para politikus dimanfaatkan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat guna mendapatkan dukungan dan merawatnya sebagai modal sosial untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik.

Menurut Frenki, modal utama seorang kandidat dalam persaingan politik tidak hanya memiliki modal politik (*political capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*), tetapi juga harus memiliki modal sosial (*social capital*). Modal sosial ini bermanfaat untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini dapat digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Semakin besar ketiga modal tersebut, maka akan semakin besar pula kemungkinan seorang kandidat dapat memenangkan kontestasi politik (Frenki,

## **DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA**

2021). Namun dalam prakteknya, penggunaan media sosial ini digunakan untuk menyerang lawan politik dengan cara menyebarkan ujaran kebencian, berita hoaks, dan sebagainya yang mengarah pada eksploitasi politik identitas.

### **Implementasi Pancasila Untuk Mengelola Politik Identitas**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta 2017 dan di Sumatera Utara 2018, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 merupakan potret kontestasi politik yang banyak memainkan isu-isu politik identitas, seperti isu etnis, agama, ras, dan putra daerah (Adiwilaga et al., 2017). Menurut Iqbal Ahnaf, Politik identitas tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di Amerika dan negara-negara Eropa. Isu-isu yang berbasis identitas itu seperti keberadaan imigran, aborsi, homoseksualitas, pemakaian hijab dan cadar, dan seterusnya. Menurutnya demokrasi bukan hanya soal kepentingan yang bersifat rasional, akan tetapi juga soal identitas. Kepentingan dan identitas itu bisa saling mempengaruhi dalam hubungan yang kompleks. Demokrasi tanpa identitas akan kehilangan kontestasi (Ahnaf, 2018).

Kontestasi politik di Indonesia dalam prakteknya selalu diwarnai dengan simbol-simbol identitas yang berbasis etnis, agama, kultural, dan ras. Adakalanya para kandidat memakai pakaian, aksesoris, dan pesan tertulis yang identik dengan identitas tertentu pada alat-alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan sebagainya. Bahkan identitas digunakan sebagai kekuatan utama dalam suatu partai politik. Pada satu sisi politik identitas merupakan sebuah keniscayaan sehingga kemunculannya sulit terhindarkan, akan tetapi pada sisi lain politik identitas dapat berpotensi menimbulkan konflik horisontal di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu politik identitas harus dikelola sedemikian rupa agar dalam prakteknya tidak berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki makna bahwa semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Secara historis, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat dan berakar dari budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai keadilan (Kaelan, 2016). Menurut Winarno, kelima nilai tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi sumber norma atau nilai instrumental. Dengan bersumber pada

kelima nilai dasar tersebut maka dapat dijabarkan norma-norma hidup dalam penyelenggaraan negara. Norma hidup bernegara itu adalah norma etik dan norma hukum negara (Winarno, 2016).

Pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka seluruh perilaku dan tindakan politik harus mengacu pada:

1. Nilai ketuhanan

Nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama Pancasila memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sehingga setiap warga negara bebas memeluk agama sesuai keyakinannya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi dampak politik identitas maka tingkah laku dan tindakan politik warga negara harus mengedepankan sikap-sikap toleransi, moderat, dan saling bekerja sama antar umat beragama.

2. Nilai kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila memiliki makna pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Tingkah laku dan tindakan politik warga negara harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan etika seperti kesetaraan, keadilan sosial, martabat manusia, toleransi, dan sikap saling menghormati. Dengan demikian dampak politik identitas dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

3. Nilai persatuan

Makna persatuan dalam sila ketiga Pancasila menjadi fondasi kuat bagi keberagaman bangsa Indonesia yang multi etnis, multi agama, multi kultur, dan multi ras). Kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman itu dapat membangkitkan semangat nasionalisme. Implementasi nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari seperti saling menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, dan bergotong royong dapat mencegah perpecahan dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia.

4. Nilai kerakyatan

Makna kerakyatan dalam sila keempat Pancasila menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dengan cara musyawarah yang dipimpin secara bijaksana. Penerapan

## **DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA**

nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti sikap demokratis, partisipatif, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam memimpin, dan menghargai aspirasi rakyat, dapat mencegah polarisasi di masyarakat sebagai akibat yang ditimbulkan dari praktek politik identitas.

### 5. Nilai keadilan

Makna keadilan dalam sila kelima Pancasila memiliki menegaskan bahwa setiap warga negara punya kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan sosial. Keadilan sosial merupakan tujuan negara Indonesia, sehingga untuk mencapainya perlu kesejahteraan untuk mengantisipasi kesenjangan sosial, tidak diskriminatif, dan melindungi kelompok minoritas.

Implementasi Pancasila untuk mengelola politik identitas yaitu dengan cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari semua nilai-nilai Pancasila dan melakukan penegakan hukum secara tidak diskriminatif terhadap praktek politik identitas yang melanggar hukum seperti ujaran kebencian, penyebaran berita hoaks, penistaan agama, dan sebagainya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan politik identitas di Indonesia sejak masa pra kemerdekaan hingga masa pasca reformasi mengalami pasang surut. Pada masa penjajahan, politik identitas muncul berbasiskan kedaerahan sebagai simbol perekat untuk membangun solidaritas kesamaan kelompok untuk melawan penjajahan. Sedangkan pada masa orde lama hingga reformasi, politik identitas muncul berbasiskan ideologi, suku, agama, ras, dan antar golongan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan politik identitas di Indonesia adalah (1) keanekaragaman suku, agama, dan budaya, (2) kebijakan otonomi daerah, dan (3) kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun implementasi Pancasila untuk mengelola politik identitas adalah dengan cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari semua nilai-nilai Pancasila dan melakukan penegakan hukum terhadap praktek politik identitas yang melanggar hukum.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat kompleksitas politik identitas, selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik identitas seperti (1) keanekaragaman suku, agama, dan budaya, (2) kebijakan otonomi daerah, dan (3) kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan studi kasus yang lebih spesifik di daerah tertentu yang memiliki dinamika politik identitas yang kuat. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktek politik identitas dalam konteks lokal.
3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh dalam perkembangan politik identitas, maka diperlukan regulasi yang lebih ketat terhadap media sosial untuk mengurangi penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian..

## DAFTAR REFERENSI

- Adiwilaga, R., Ridha TR, M., & Mustofa, M. U. (2017). Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 269–284.
- Afala, L. O. M. (2020). *Politik Identitas di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Ahnaf, M. I. (2018, August 19). *Politik Identitas Tak Terhindarkan, dan Tak Selalu Buruk*. Program Studi Agama Dan Lintas Budaya SRCS UGM. <https://crcs.ugm.ac.id/politik-identitas-tak-terhindarkan-dan-tak-selalu-buruk/>
- Andriyani, L. (2011). *Politik Identitas: Studi Partai Politik Berbasis pada Identitas Agama, Nasional dan Pluralis*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Frenki. (2021). Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 29–48.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19–30.

## **DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA**

- Maarif, A. S. et al. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
- Nasrudin, J. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47.
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati.
- Sulaeman, E. (2022). *Politik Identitas dalam Perspektif Al Quran dan Teori Modern*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Winarno. (2016). *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PT. Bumi Aksara Group.